

**Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Tingkat
Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada
Provinsi Sumatera Utara**

Novita Sari¹, Isnaini Harahap², Khairina Tambunan³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam, UIN Sumatera Utara
novitasr3221@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out the effect of fiscal decentralization and poverty levels on economic growth in North Sumatra province. This research uses quantitative methods, secondary data collection techniques with documentation using data from the Central Bureau of Statistics for each district/city in North Sumatra. . This study uses the SPSS statistical tool. Data were analyzed using multiple linear regression analysis method. The results of this study indicate that fiscal decentralization has a negative and significant effect on economic growth. This is evidenced by the fact that the tcount for the Fiscal Decentralization variable (-2.831) is smaller than the ttable (1.984) and the sig value is 0.006 <0.05. Poverty levels have a negative and significant effect on economic growth. This is evidenced by because the tcount for the Poverty Level variable (-2.664) is smaller than ttable (1.984) and the sig value is 0.009 <0.05, the decision is Ha2 rejected and Ho2 accepted. Meanwhile, the F test of Fiscal Decentralization and Poverty Level has a simultaneous and significant positive effect on Economic Growth. This is evidenced by the fact that Fcount is (11.334) greater than Ftable (3.94) and has a sig value of 0.000 <0.05. Meanwhile, in testing the coefficient of determination, the R Square value is 0.602. This shows that the independent variables, namely Fiscal Decentralization and Poverty Level, are able to explain the dependent variable, namely Economic Growth of 19.1% while the remaining 80.9% is explained by other variables outside the regression model.

Keywords: Fiscal Decentralization, Poverty Level, Economic Growth

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Provinsi Sumatera Utara Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, teknik pengumpulan data sekunder dengan dokumentasi menggunakan data-data dari Badan Pusat Statistik dari masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan alat statistik SPSS. Data dianalisis dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Desentralisasi Fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan Karena t_{hitung} untuk variabel Desentralisasi Fiskal (-2,831) lebih kecil dari t_{tabel} (1,984) dan nilai sig 0,006 < 0,05. Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan Karena t_{hitung} untuk variabel Tingkat Kemiskinan (-2,664) lebih kecil dari t_{tabel} (1,984) dan nilai sig 0,009 < 0,05 maka keputusannya Ha2 ditolak dan Ho2 diterima. Sedangkan pada uji F Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemiskinan berpengaruh positif secara simultan dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan Karena F_{hitung} sebesar (11,334) lebih besar dari F_{tabel} (3,94) dan nilai sig 0,000 < 0,05. Sementara itu pada pengujian koefisien determinasi, bahwa nilai R Square sebesar 0,602. Hal ini menunjukkan bahwa

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Vol 3 No 2 (2023) 586-608 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710
DOI: 10.47476/manageria.v3i2.3907

variabel bebas yaitu Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemiskinan mampu menerangkan variabel terikat yaitu Pertumbuhan Ekonomi sebesar 19,1% sedangkan sisanya sebesar 80,9% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model regresi.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi

PENDAHULUAN

Pada saat ini berbagai negara di dunia dengan sistem pemerintahannya yang ada, terus mencoba untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di negaranya masing-masing. Salah satu indikator yang bisa dilihat untuk menentukan negara tersebut memiliki kesejahteraan yang tinggi adalah tentunya dengan melihat tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia (Ernita, Amar, & Syofyan, 2013).

Tujuan pembangunan nasional Negara Indonesia salah satunya sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum menurut Badan Pusat Statistik merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial penduduk negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya. Kesejahteraan umum di Indonesia dapat digambarkan salah satunya berdasarkan tingkat kemiskinan penduduk di Indonesia. Terdapat hubungan negatif antara kesejahteraan umum dengan tingkat kemiskinan di Indonesia, semakin rendah tingkat kemiskinan di Indonesia menggambarkan semakin tinggi kesejahteraan penduduk di Indonesia (Sri Yuniarti, 2016).

Pemerintah melakukan berbagai kegiatan pembangunan nasional Meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satunya melalui bimbingan Berbagai kegiatan pembangunan untuk daerah, khususnya pembangunan Di daerah dengan tingkat kesejahteraan yang relatif tinggi yang rendah. Pembangunan itu sendiri secara terpadu dan Berkelanjutan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah Akar dan tujuan ditetapkan melalui program pembangunan negara dalam jangka pendek dan jangka panjang. Indikator utama keberhasilan pembangunan nasional salah satunya adalah menurunnya jumlah penduduk miskin di Indonesia (Jundi & Poerwono, 2014).

Menurut Lincolin, Pertumbuhan Ekonomi didefinisikan sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau perbaikan sistem kelembagaan atau tidak (Arsyad, 2015).

Pertumbuhan Ekonomi adalah sebuah proses perubahan kondisi perekonomian yang terjadi disuatu Negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ketika tingkat kegiatan ekonominya meningkat atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan output per kapita dianggap dapat menjelaskan ukuran kenaikan taraf hidup. Karena pertumbuhan ekonomi juga didefinisikan sebagai

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Vol 3 No 2 (2023) 586-608 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710
DOI: 10.47476/manageria.v3i2.3907

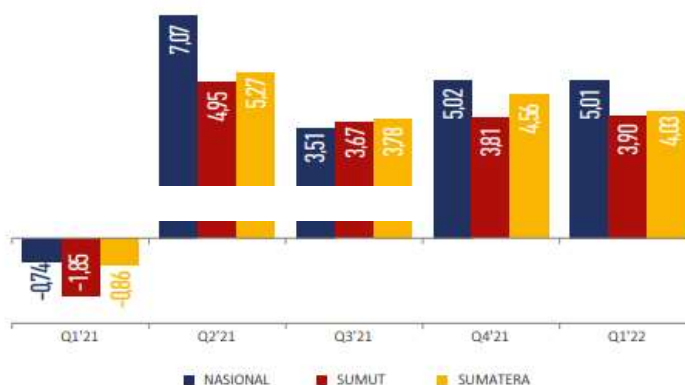
pertumbuhan pendapatan masyarakat secara keseluruhan sebagai cerminan dari kenaikan seluruh nilai tambah (Kurnyasihsl & Syahbudi, 2022).

Pertumbuhan ekonomi adalah penambahan produk domestik bruto (PDB) suatu negara dari waktu ke waktu. PDB adalah nilai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan persentase pertumbuhan PDB dari tahun ke tahun.

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah [Jawa Barat](#), [Jawa Timur](#), dan [Jawa Tengah](#). Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990, penduduk Sumatra Utara berjumlah 10,81 juta jiwa, dan pada tahun 2010 jumlah penduduk Sumatra Utara telah meningkat menjadi 12,98 juta jiwa. Kepadatan penduduk Sumatra Utara pada tahun 1990 adalah 143 jiwa per km² dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 178 jiwa per km². Dengan Laju Pertumbuhan Penduduk dari tahun 2000-2010 sebesar 1,10 persen. Sensus penduduk tahun 2020, penduduk Sumatra Utara bertambah menjadi 13.937.797 jiwa, dengan kepadatan penduduk 191 jiwa/km², dan tahun [2021](#) berjumlah 15.136.522 jiwa. Sumatra Utara kaya akan sumber daya alam berupa gas alam di daerah Tandam, Binjai dan minyak bumi di Pangkalan Brandan, Kabupaten

Langkat yang telah dieksplorasi sejak zaman Hindia Belanda. Selain itu di Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara juga terdapat PT Inalum yang bergerak di bidang penambangan bijih dan peleburan aluminium yang merupakan satu-satunya di Asia Tenggara. Sungai-sungai yang berhulu di pegunungan sekitar Danau Toba juga merupakan sumber daya alam yang cukup berpotensi untuk dieksploitasi menjadi sumber daya pembangkit listrik tenaga air. PLTA Asahan yang merupakan PLTA terbesar di Sumatra terdapat di Kabupaten Toba Samosir. Selain itu, di kawasan pegunungan terdapat banyak sekali titik-titik panas geotermal yang sangat berpotensi dikembangkan sebagai sumber energi panas maupun uap yang selanjutnya dapat ditransformasikan menjadi energi listrik.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan I-2022 mencatatkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tercatat 3,90% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV-2021 yang mencapai 3,81% (yoy). Namun demikian, realisasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan I-2022 masih lebih rendah dari nasional dan Sumatera yang masing-masing tumbuh sebesar 5,01% (yoy) dan 4,03% (yoy) pada gambar di bawah ini. Akselerasi pertumbuhan ekonomi Sumut bersumber dari peningkatan ekspor, investasi, dan konsumsi rumah tangga. Di sisi lain, konsumsi Pemerintah tercatat mengalami deselerasi.



Gambar 1.1. Grafik Perkembangan PDRB dan PDB

Sumber : Laporan Perkembangan Provinsi Sumatera Utara

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan I-2022 ditopang oleh akselerasi kinerja LU Perdagangan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga dari sisi pengeluaran yang menunjukkan daya beli masyarakat yang membaik. LU Real Estate juga tumbuh pada triwulan berjalan diprakirakan akibat berlanjutnya kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) untuk pembelian properti.

Selain pada fenomena di atas, juga terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian terdahulu, yaitu salah satunya pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sri Adipura, Rahayu, & Junaidi, 2021) dengan judul penelitian "Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Dan Efisiensi Terhadap PDRB Riil Per Kapita Dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening", hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Desentralisasi Fiskal dan Efisiensi melalui Indeks Pembangunan Manusia Tidak berpengaruh terhadap PDRB Riil Per Kapita, sedangkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Pratiwi, Yunitasari, & Wilantari, 2021) dengan judul penelitian "Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur" hasil penelitiannya menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

TINJAUAN LITERATUR

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Lincolin, Pertumbuhan Ekonomi didefinisikan sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau perbaikan sistem kelembagaan atau tidak (Arsyad, 2015).

Pertumbuhan Ekonomi adalah sebuah proses perubahan kondisi perkonomian yang terjadi disuatu Negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ketika tingkat kegiatan ekonominya meningkat

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Vol 3 No 2 (2023) 586-608 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i2.3907

atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan output per kapita dianggap dapat menjelaskan ukuran kenaikan taraf hidup. Karena pertumbuhan ekonomi juga didefinisikan sebagai pertumbuhan pendapatan masyarakat secara keseluruhan sebagai cerminan dari kenaikan seluruh nilai tambah.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu Menurut Sukirno (2006) dalam (Yafiz, Arif, & Naser Daulay, 2016) menyatakan bahwa kebanyakan literatur ekonomi mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto rill atau pendapatan nasional rill. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output rill. Defenisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur output rill per orang (Imsar, 2018).

Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa karakteristik pertumbuhan ekonomi dalam Islam yang dikemukakan oleh Tarqi, sebagai berikut :

1) Serba Meliputi

Islam melihat bahwa pertumbuhan lebih dari sekedar materi dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientalis terbatas yang ingin dicapai oleh sistem-sistem kontemporer yaitu untuk menciptakan keadilan sosial.

2) Berimbang

Pertumbuhan ekonomi Islam tidak hanya diorientasikan untuk menciptakan pertumbuhan produksi, namun ditujukan berlandaskan keadilan distribusi sesuai dengan firman Allah QS. Al-Maidah [5]:8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ تَعْدِلُوا ٱلْعَدِلُوٓآ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”* (Q.S Al-Maidah : 8) (Indonesia, 2019).

Keadilan dilakukan dengan memberlakukan kebaikan bagi semua manusia dalam kondisi apapun. Tujuan pertumbuhan ekonomi dalam Islam yaitu adanya

kesempatan semua anggota masyarakat untuk mendapatkan kecukupan, bukan kekurangan.

3) Realistis

Realistis adalah suatu pandangan terhadap permasalahan sesuai kenyataan. Sifat realistis dalam bidang pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa Islam melihat persoalan ekonomi dan sosial yang mungkin terjadi di masyarakat dengan tawaran solusi yang juga realistis.

4) Keadilan

Islam dalam menegakkan hukum-hukumnya didasarkan atas landasan keadilan di antara manusia.

5) Bertanggung Jawab

Landasan adanya bertanggung jawab sebagai salah satu fondasi paling penting diungkapkan secara jelas dan gamblang dalam syariat Islam.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

a. Akumulasi Modal

Akumulasi modal akan terjadi jika ada bagian pada masa sekarang yang ditabung kemudian diinvestasikan untuk dapat memperbesar output pada masa yang akan datang. Pabrik-pabrik, mesin-mesin, peralatan-peralatan dan barang-barang baru akan meningkatkan stok modal fisik suatu Negara yaitu jumlah nilai riil bersih dari semua barang-barang modal produktif secara fisik sehingga pada gilirannya akan memungkinkan Negara tersebut untuk mencapai tingkat output yang lebih besar. Investasi jenis ini sering diklarifikasikan sebagai investasi di sektor produktif (Arsyad, 2015). Jenis investasi tersebut akan mendorong terciptanya akumulasi modal yang positif (I. Harahap, Mailin, & Amini, 2019)

b. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan fungsi-fungsi publik atau yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep desentralisasi fiskal dikenal juga dengan *money follow function* yang berarti bahwa pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan diikuti oleh pembagian wewenang dalam aspek penerimaan pendanaan (Christia & Ispriyarso, 2019).

c. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah penyakit dalam perekonomian sebuah negara, terutama yang masih ada negara berkembang atau negara ketiga dengan kemiskinan parah kompleks dan multidimensi (Nasution, Maidalena, & Syahriza, 2015). kemiskinan itu rumit artinya kemiskinan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi latar belakangnya panjang dan rumit sehingga sulit mengetahui akar penyebab kemiskinan itu sendiri, dan kemiskinan bersifat multidimensi, yang artinya adalah jumlah kebutuhan manusia yang berbeda, maka aspek utama lain dari kemiskinan adalah kemiskinan aset. Organisasi sosial-politik, pengetahuan

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Vol 3 No 2 (2023) 586-608 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i2.3907

dan keterampilan, dan aset jejaring sosial sekunder, bentuk-bentuk kemiskinan sumber daya keuangan, informasi. Karena sifat kemiskinan Ini memanasifestasikan dirinya sebagai kekurangan nutrisi, air dan perumahan yang tidak layak, pelayanan kesehatan yang buruk, dan tingkat pendidikan yang rendah (Prayoga et al., 2021).

d. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berarti semakin banyak jumlah angkatan kerja berarti semakin banyak pasokan tenaga kerja dan semakin banyak jumlah penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik (Arif, 2020). Seandainya Negara tersebut tidak menggunakan sumberdaya fisik dan sumberdaya manusia secara penuh, maka akan ada kapasitas sumberdaya manusia, sumberdaya modal, serta sumberdaya tanah yang menganggur. Tetapi perlu diingatkan bahwa tidak selamanya adanya pertumbuhan sumberdaya akan mendorong pertumbuhan output yang lebih tinggi (I. Harahap, 2019).

Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam

Pertumbuhan ekonomi Islam tidak hanya diorientasikan untuk menciptakan pertumbuhan produksi, namun ditujukan berlandaskan keadilan distribusi sesuai dengan firman Allah QS. Al-Maidah [5]:8:

A. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ تَعْدِلُوا ۗ ٱعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”* (Q.S Al-Maidah : 8) (Indonesia, 2019).

Keadilan dilakukan dengan memberlakukan kebaikan bagi semua manusia dalam kondisi apapun. Tujuan pertumbuhan ekonomi dalam Islam yaitu adanya kesempatan semua anggota masyarakat untuk mendapatkan kecukupan, bukan kekurangan.

Desentralisasi Fiskal

Secara singkat yang dimaksud dengan desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Christia & Ispriyarso, 2019).

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses pemindahan wewenang dan tanggung jawab keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tujuan

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Vol 3 No 2 (2023) 586-608 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i2.3907

utama desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Desentralisasi fiskal dapat memiliki efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.

Sistem hubungan keuangan pusat dan daerah merupakan suatu mekanisme distribusi sejumlah dana anggaran dari pemerintah pusat kepada daerah dalam kerangka otonomi daerah. Konsep perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah konsekuensi dari adanya tanggung jawab terhadap kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Karena itu setiap tingkatan pemerintahan berkepentingan terhadap kebijakan desentralisasi fiskal. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah pusat pun masih mempunyai kewenangan pemerintahan. Artinya, kewenangan pusat bukan kewenangan yang tersisa seperti yang diungkapkan oleh beberapa pakar tentang otonomi daerah. Dalam desentralisasi fiskal juga erat kaitannya dengan pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan salah satu dari sumber penerimaan daerah. Ada beberapa definisi dari pendapatan asli daerah (PAD). Definisi PAD menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (18) Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Warsito Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendaptan asli saerah lainnya yang sah (Rahman, 2016).

Berdasarkan pada pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri.

Indikator Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan fungsi-fungsi publik atau yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep desentralisasi fiskal dikenal juga dengan *money follow function* yang berarti bahwa pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan diikuti oleh pembagian wewenang dalam aspek penerimaan pendanaan (Kusuma, 2016). Untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal dapat diketahui dari perbandingan rasio derajat desentralisasi fiskal sebagai berikut :

$$DDF = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Pengeluaran Daerah

Desentralisasi Fiskal Dalam Perspektif Islam

Desentralisasi fiskal dalam perspektif Islam adalah sistem pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangannya sendiri, tanpa tergantung pada pemerintah pusat.

Dalam perspektif Islam, desentralisasi fiskal merupakan upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan adanya desentralisasi fiskal, diharapkan dapat terjadi perbaikan kualitas hidup masyarakat secara merata di seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengedepankan keadilan, pemerataan, dan keseimbangan sosial.

Pengertian Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (2000), kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang individu atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dan memiliki standart tertentu. Ukuran standar hidup layak yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistika pada 2012 yaitu sebesar Rp 355,740.00/bulan, dengan kata lain, per-individu memiliki penghasilan sebesar Rp 11,000.00/hari. Penduduk yang memiliki penghasilan di bawah standar yang telah ditentukan oleh Badan Pusat Statistika dianggap sebagai penduduk miskin (Tambunan, Harahap, & Marliyah, 2019).

Kemiskinan menurut *World Bank* merupakan keadaan dimana seorang individu atau kelompok tidak memiliki pilihan atau peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya guna menjalani kehidupan yang sehat dan lebih baik sesuai standar hidup, memiliki harga diri dan dihargai oleh sesamanya. standar rasio tingkat kemiskinan yang ditetapkan oleh *World Bank* sebesar \$2/day atau sekitar Rp 22,000.00/hari (Zuhdiyaty & Kaluge, 2017).

Kemiskinan adalah penyakit dalam perekonomian sebuah negara, terutama yang masih ada negara berkembang atau negara ketiga dengan kemiskinan parah kompleks dan multidimensi. kemiskinan itu rumit artinya kemiskinan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi latar belakangnya panjang dan rumit sehingga sulit mengetahui akar penyebab kemiskinan itu sendiri, dan kemiskinan bersifat multidimensi, yang artinya adalah jumlah kebutuhan manusia yang berbeda, maka aspek utama lain dari kemiskinan adalah kemiskinan aset (R. D. Harahap, Harahap, Syari, & Medan, 2019). Organisasi sosial-politik, pengetahuan dan keterampilan, dan

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Vol 3 No 2 (2023) 586-608 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i2.3907

aset jejaring sosial sekunder, bentuk-bentuk kemiskinan sumber daya keuangan, informasi. Karena sifat kemiskinan ini memanasifestasikan dirinya sebagai kekurangan nutrisi, air dan perumahan yang tidak layak, pelayanan kesehatan yang buruk, dan tingkat pendidikan yang rendah (Prayoga et al., 2021).

Pola Kemiskinan

Menurut Sumitro Djojohadikusumo pola kemiskinan ada empat yaitu, Pertama adalah persistent poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun (I. Harahap, Yafiz, Batubara, & Tarigan, 2020). Pola kedua adalah cyclical poverty, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah seasonal poverty, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah accidental poverty, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (Zuhdiyaty & Kaluge, 2017).

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan asosiatif karena pertanyaan dalam penelitian ini bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel, kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial. Untuk dapat melakukan pengukuran, setiap fenomena sosial dijabarkan ke dalam beberapa komponen masalah, variabel, dan indikator. Setiap variabel yang ditentukan diukur dengan memberikan simbol-simbol angka yang berbeda-beda sesuai dengan kategori informasi yang berkaitan dengan variabel tersebut. Dengan menggunakan simbol-simbol angka tersebut, teknik perhitungan secara kuantitatif matematik dapat dilakukan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter (Bi Rahmani, 2016).

Selain itu metode penelitian kuantitatif dikatakan juga sebagai metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial. Untuk dapat melakukan pengukuran, setiap fenomena sosial dijabarkan ke dalam beberapa komponen masalah, variabel dan indikator. Setiap variabel yang ditentukan diukur dengan memberikan simbol-simbol angka yang berbeda-beda sesuai dengan kategori informasi yang berkaitan dengan variabel tersebut. Dengan menggunakan simbol-simbol angka tersebut, teknik perhitungan secara kuantitatif matematik dapat dilakukan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter (Bi Rahmani, 2016).

Waktu Penelitian

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Vol 3 No 2 (2023) 586-608 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710
DOI: 10.47476/manageria.v3i2.3907

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2022 s/d Selesai. Berikut ini tabel waktu penelitian.

Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2022										2023	
		Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	feb	
1	Pengajuan Judul Skripsi												
2	Pengerjaan Proposal												
3	Bimbingan Proposal Skripsi												
4	Seminar Proposal												
5	Penelitian												
6	Bimbingan Skripsi												
7	Sidang Munaqasah												

Subjek dan Objek

1. Subjek

Populasi/Subjek adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Bi Rahmani, 2016). Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

2. Objek

Sampel/Objek adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling. Disini sampel harus benar-benar bisa mencerminkan keadaan populasi, artinya kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas populasi.

Sampel dalam penelitian ini adalah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 34 Kabupaten/Kota periode 2018-2021. Sampel dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- Seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara
- Data Fiskal Kementerian Keuangan
- Memiliki data lengkap (Tingkat Kemiskinan).

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Vol 3 No 2 (2023) 586-608 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i2.3907

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka (Hardani et al., 2020). Data operasional yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder, karena menggunakan data Badan Pusat Statistika, Kementerian Keuangan, dan OJK.

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan data Pengumpul data, tetapi melalui orang lain atau melalui dokumen (Syafina, 2019).

Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Kepustakaan

Penelitian ini melihat pada buku-buku, jurnal, artikel serta hasil laporan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Dokumentasi

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan yang bersumber langsung Badan Pusat Statistika, Kementerian Keuangan, dan OJK.

Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda, karena membahas tentang tiga buah variabel independen dan dua buah variabel dependen. Untuk mendukung hasil dan akurasi penelitian, data penelitian yang diperoleh akan dianalisis dengan alat statistik melalui bantuan program SPSS (*Statistical Package for the Social Science*) Versi 20.0, kemudian dijelaskan secara deskriptif.

1. Uji Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan model penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Dengan analisis deskriptif, dimungkinkan untuk melakukan hubungan antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal (Ikhsan, 2014). Penelitian ini menjabarkan nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari setiap variabel.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Alat uji yang digunakan adalah dengan analisis grafik histogram, grafik *normal probability plot* serta uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov (1-sample K-S)* (Ghozali, 2017).

Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik normal probability plot adalah :

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi syarat normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S) adalah :

- 1) Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ atau 5% maka data terdistribusi secara normal.
- 2) Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ atau 5% maka data tidak terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang kuat diantara variabel-variabel independen yang diikutsertakan dalam pembentukan model. Dasar pengambilan keputusan model regresi yang baik atau untuk mendeteksi apakah model regresi linear mengalami multikolinearitas dapat diperiksa menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance Value*. Batas dari *Tolerance Value* adalah $> 0,10$ dari *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10 (Syafina, 2018).

c. Uji Autokorelasi

Pengujian asumsi berikutnya adalah pengujian autokorelasi. Menjelaskan bahwa uji autokorelasi memiliki tujuan untuk menguji apakah ada korelasi antara variabel itu sendiri (Bi Rahmani, 2016). Untuk menguji adanya autokorelasi dalam penelitian ini digunakan metode *Durbin-Watson test*, dimana dasar pengambilan keputusan ada atau tidak ada autokorelasi adalah sebagai berikut:

- 1) Jika angka D-W di bawah (-2) berarti ada autokorelasi positif.
- 2) Jika angka D-W di antara (-2) sampai (+2), berarti tidak ada autokorelasi.
- 3) Jika angka D-W di atas (+2) berarti ada autokorelasi negatif.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Vol 3 No 2 (2023) 586-608 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i2.3907

Metode yang digunakan untuk mengkaji ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai variabel dependen (ZPRED) dengan nilai residual (SRESID). Dasar analisis ini adalah Titik-titik tersebar di atas dan di bawah atau sekitar angka 0 dan data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebur kemudian menyempit dan melebur kembali dan Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja (Bi Rahmani, 2016).

3. Uji Hipotesis

a. Uji t (Uji Parsial)

Uji t atau lebih dikenal dengan sebutan uji parsial adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual atau parsial dapat menerangkan variasi variabel terikat (Syafina, 2018). Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai t hitung $>$ t tabel dan nilai Sig. t $< \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai t hitung $<$ t tabel dan nilai Sig. t $> \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji F (Uji Simultan)

Uji F atau lebih dikenal dengan uji simultan adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Syafina, 2018). Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji F adalah :

- 1) Jika F dihitung $>$ F tabel dan nilai Sig. F $< \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika F hitung $<$ F tabel dan nilai Sig. F $> \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Rumus F Tabel : (Sahid Raharjo, 2018)

$$F_{\text{tabel}} = F(k : n-k)$$

Keterangan :

n : jumlah sampel

k : jumlah variabel X

4. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio (Syafina, 2018).
Rumus persamaan regresi yang digunakan adalah :

$$PE = a + b_1DF - b_2TK + e$$

Keterangan :

<i>a</i>	= Konstanta
DF	= Desentralisasi Fiskal
TK	= Tingkat Kemiskinan
PE	= Pertumbuhan Ekonomi
<i>b</i> ₁ dan <i>b</i> ₂	= Koefisien regresi untuk DF dan TK
<i>e</i>	= Faktor Gangguan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Desentralisasi Fiskal Sumatera Utara

Desentralisasi fiskal adalah proses pemindahan kewenangan dan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Di Sumatera Utara, desentralisasi fiskal telah berkembang sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Sumatera Utara

Perkembangan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara selama beberapa tahun terakhir telah mengalami perbaikan. Pemerintah setempat telah berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui berbagai program pemerintah, seperti program bantuan sosial, program pemberdayaan ekonomi, dan program pemberdayaan masyarakat. Namun, masih ada beberapa masalah yang harus diatasi dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Sumatera Utara.

1. Uji Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran umum atau deskripsi suatu data yang dijadikan sampel penelitian, dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi dari variabel yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Hasil Uji Analisis Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DF	99	149,657	7690,039	2629,11246	1894,385890
TK	99	3,880	26,420	10,00172	4,386464
PE	99	-,940	35,891	17,70518	11,572905
Valid N (listwise)	99				

Sumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa variabel Desentralisasi Fiskal(DF) memiliki nilai minimum 149,657 dan nilai maksimum 7690,039 nilai

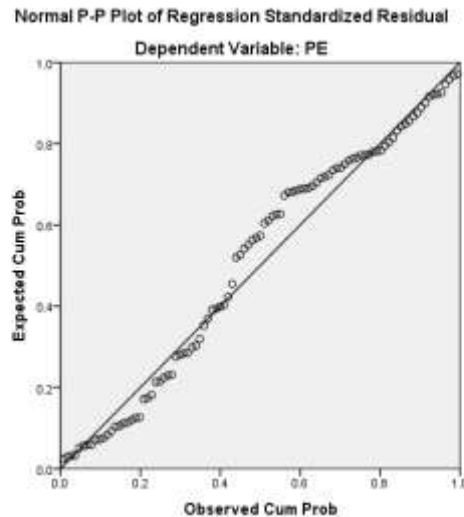
rata-rata sebesar 2629,112 dengan simpangan baku atau penyebaran rata-rata sebesar 1894,385.

Variabel Tingkat Kemiskinan(TK) memiliki nilai minimum 3,880 dan nilai maksimum 26,420 nilai rata-rata sebesar 10,001 dengan simpangan baku atau penyebaran rata-rata sebesar 4,386.

Variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) memiliki nilai minimum -0,940 dan nilai maksimum 35,891 nilai rata-rata sebesar 17,705 dengan simpangan baku atau penyebaran rata-rata sebesar 11,572.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



Berdasarkan gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa titik-titik atau pola menyebar di sekitar diagonal dan mengikuti diagonal tersebut sehingga data penelitian telah terdistribusi normal dan juga telah memenuhi model regresi yang baik. Hasil uji normalitas juga dapat dilihat pada diagram histogram pada gambar 4.2 sebagai berikut.

Selanjutnya adalah menggunakan perhitungan *Kolmogrov-Smirnov*. Apabila nilai asymptotic significant (2-tailed) lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data variabel telah berdistribusi normal. Hasil uji normalitas seluruh variabel menggunakan perhitungan *Kolmogrov-Smirnov* menggunakan software SPSS dapat dilihat di bawah ini.

**Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas dengan *Kolmogrov Smirnov*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	10,40907821
	Absolute	,119
Most Extreme Differences	Positive	,078
	Negative	-,119
Kolmogorov-Smirnov Z		1,184
Asymp. Sig. (2-tailed)		,121

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS

Baik dilihat dari hasil uji normalitas seluruh variabel menggunakan perhitungan *Kolmogorov-Smirnov* nilai *asymptotic significant (2-tailed)* nilainya sebesar $0,121 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data variabel telah berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi apakah model regresi linear mengalami multikolinearitas dapat diperiksa menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance Value*. Batas dari *Tolerance Value* adalah $> 0,10$ dari *Variance Inflation Factor (VIF) < 10*.

c. Uji Autokorelasi

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.437 ^a	.191	.174	10.51695	.384
a. Predictors: (Constant), TK, DF					
b. Dependent Variable: PE					

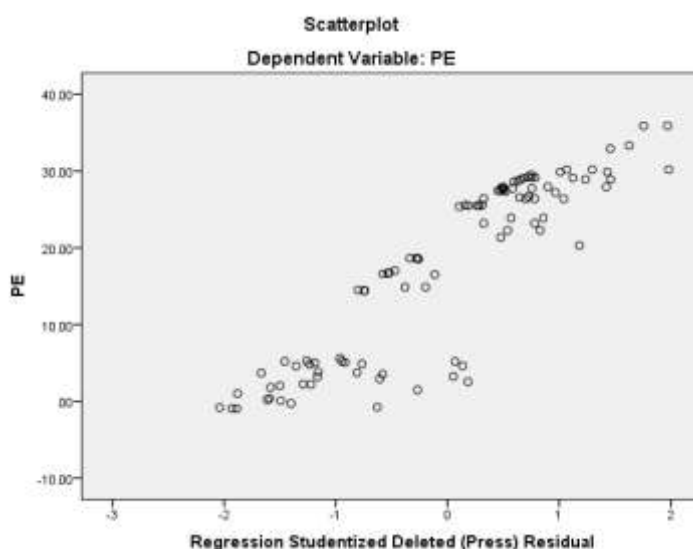
Sumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS

Dari tabel diatas, diketahui nilai *Durbin Watson* untuk Model 1 adalah 0,384. Daerah bebas autokorelasi untuk jumlah sampel (n) 99, dan variabel independen sebanyak dua buah, maka dapatlah nilai DU sebesar 1,714.

Jadi jika $DW > DU$ dan $(4-DW) > DU$ atau $0,384 < 1,714$ dan $(4- 0,384 = 3,616) > 1,714$. Maka dapat dikatakan untuk model ini tidak mengalami autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu ke pengamat lain. Regresi yang baik harusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika *varians* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Jika titik-titik *scatter plot* membentuk pola-pola tertentu, maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Namun jika titik-titik menyebar di atas dan maka titik terdapat heteroskedastisitas.



Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan gambar 4.3 menunjukkan pola titik-titik pada grafik *scatter plot* tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah titik nol pada sumbu Y. Hal ini berarti pada model regresi penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Pertumbuhan Ekonomi.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Desentralisasi fiskal merupakan suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan fungsi-fungsi publik atau yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep desentralisasi fiskal dikenal juga dengan *money follow function* yang berarti bahwa pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan diikuti oleh pembagian wewenang dalam aspek penerimaan pendanaan (Christia & Ispriyarso, 2019). Desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan argumentasi alokasi anggaran untuk barang publik lokal yang dilakukan oleh

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Vol 3 No 2 (2023) 586-608 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i2.3907

pemerintah daerah lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena keunggulan informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Christia & Ispriyarso, 2019). Maka, berdasarkan teori di atas bahwa variabel Desentralisasi Fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dikarenakan pemerintah daerah lemah dalam pengelolaan anggaran dan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan asli daerah belum dimanfaatkan secara optimal, terutama untuk kemandirian daerah sehingga menyebabkan desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kemiskinan adalah penyakit dalam perekonomian sebuah negara, terutama yang masih ada negara berkembang atau negara ketiga dengan kemiskinan parah kompleks dan multidimensi. kemiskinan itu rumit artinya kemiskinan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi latar belakangnya panjang dan rumit sehingga sulit mengetahui akar penyebab kemiskinan itu sendiri, dan kemiskinan bersifat multidimensi, yang artinya adalah jumlah kebutuhan manusia yang berbeda, maka aspek utama lain dari kemiskinan adalah kemiskinan aset. Organisasi sosial-politik, pengetahuan dan keterampilan, dan aset jejaring sosial sekunder, bentuk-bentuk kemiskinan sumber daya keuangan, informasi. Karena sifat kemiskinan ini memanifestasikan dirinya sebagai kekurangan nutrisi, air dan perumahan yang tidak layak, pelayanan kesehatan yang buruk, dan tingkat pendidikan yang rendah (Prayoga, Muchtolifah, & Sishadiyati, 2021).

Tingkat kemiskinan adalah persentase jumlah penduduk yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, yaitu batas minimum pendapatan yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pertumbuhan ekonomi adalah penambahan produk domestik bruto (PDB) suatu negara dari waktu ke waktu.

Ada beberapa pendapat tentang hubungan antara tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa studi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menurunkan tingkat kemiskinan, karena meningkatnya produksi dan pendapatan menyebabkan kenaikan daya beli masyarakat. Namun, ada juga studi yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menurunkan tingkat kemiskinan, terutama jika tidak didukung oleh kebijakan-kebijakan yang sesuai untuk meningkatkan distribusi pendapatan. Sehingga, hubungan antara tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu linear. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menurunkan tingkat kemiskinan jika didukung oleh kebijakan-kebijakan yang tepat untuk meningkatkan distribusi pendapatan. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menurunkan tingkat kemiskinan jika tidak didukung oleh kebijakan-kebijakan yang sesuai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Vol 3 No 2 (2023) 586-608 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i2.3907

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Desentralisasi Fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan Karena t_{hitung} untuk variabel Desentralisasi Fiskal (-2,831) lebih kecil dari t_{tabel} (1,984) dan nilai sig 0,006 < 0,05.
2. Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan Karena t_{hitung} untuk variabel Tingkat Kemiskinan (-2,664) lebih kecil dari t_{tabel} (1,984) dan nilai sig 0,009 < 0,05 maka keputusannya H_a2 ditolak dan H_o2 diterima.
3. Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemiskinan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan Karena F_{hitung} sebesar (11,334) lebih besar dari F_{tabel} (3,94) dan nilai sig 0,000 < 0,05. Sementara itu pada pengujian koefisien determinasi, bahwa nilai R^2 sebesar 0,191. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemiskinan mampu menerangkan variabel terikat yaitu Pertumbuhan Ekonomi sebesar 19,1% sedangkan sisanya sebesar 80,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah
Diharapkan berguna bagi para pembuat kebijakan publik serta kepentingan praktis pelaksanaan desentralisasi fiskal.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Disarankan sebaiknya bisa meneliti pada khalayak yang lebih luas, sebaiknya bisa memberi tambahan variabel yang lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, supaya mendapatkan hasil yang lebih akurat.
3. Bagi Akademik
Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu ekonomi islam tentang faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal Tarigan, A., Yafiz, M., Harahap, I., Marliyah, Batubara, C., Ridwan, M., ... Nurhani. (2015). *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*. Medan: Febi Press Uinsu.
- Andriani, N. N. (2021). *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jambi*. Iain Ponorogo.
- Anggita, R., & Sari, L. K. (2021). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019. *Seminar Nasional Official Statistics, 2021*(1), 641-650.

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Vol 3 No 2 (2023) 586-608 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i2.3907

- Arif, M. (2020). *Marketing Skill*. Medan: Febi Uin Su Press.
- Arsyad, L. (2015). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Upt Stim Ykpn.
- Asnun, A. P. (2021). *Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Gender, Dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dengan Rasio Gini Sebagai Variabel Intervening*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Azis, A., Tampubolon, D., & Desweni, S. P. (2022). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2012-2020. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 41–52.
- Bi Rahmani, N. A. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: Febi Press Uinsu.
- Cahyono, E., & Adzim, A. (2019). Pengaruh Penerimaan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2019. *Journal Of Public Power*, 3(1), 38–50.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163.
- Dama, H. Y. (2016). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado (Tahun 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3).
- Davies, A., & Quinlivan, G. (2006). A Panel Data Analysis Of The Impact Of Trade On Human Development. *The Journal Of Socio-Economics*, 35(5), 868–876.
- Dyanti, F. E. (2021). *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada 33 Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2019*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ernita, D., Amar, S., & Syofyan, E. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Konsumsi Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(2).
- Ghozali, I. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss Jakarta: Salemba Empat*.
- H Timotius, C. (2017). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Harahap, I. (2019). *Ekonomi Pembangunan: Pendekatan Transdisipliner*.
- Harahap, I., Juliati Nasution, Y. S., Marliyah, & Syariza, R. (2017). *Hadis-Hadis Ekonomi*. Prenada Media.
- Harahap, I., Mailin, M., & Amini, S. (2019). *Peran Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pesantren Mawaridussalam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*.
- Harahap, I., Nasution, Y. S. J., & Chairina, C. (2021). Analysis Of Muslim Customer Loyalty Shopping For Fashion In The Traditional Impres I Market In Kisaran. *Budapest International Research And Critics Institute-Journal (Birci-Journal)*, 4(1), 28–38.
- Harahap, I., Yafiz, M., Batubara, C., & Tarigan, A. A. (2020). Social Capital And Economic Development: Learning From Kasih Sayang Village. *International Conference On Social Studies And Environmental Issues (Icossei 2019)*, 250–256. Atlantis Press.
- Harahap, R. D., Harahap, M. I., Syari, M. E., & Medan, J. W. I. P. V. (2019). Pengaruh Dau Dan Pad Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Vol 3 No 2 (2023) 586-608 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i2.3907

- Variabel Intervening. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5, 247–260.
- Hardani, H. A., Ustiawaty, J., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sykmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group.
- Hasyim, A. I. (2017). *Ekonomi Makro*. Prenada Media.
- Ikhsan, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Citapustaka Media.
- Imsar, I. (2018). *Analisis Strategi Pengembangan Usaha Ucok Durian Medan*. Indonesia, K. A. R. (2019). *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Bil Hadis*. Bandung: Cordoba.
- Jundi, M. Al, & Poerwono, D. (2014). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi Di Indonesia*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis.
- Kurnyasihsl, A., & Syahbudi, M. (2023). Pengaruh E-Commerce Dalam Memajukan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Binjai Tahun 2022. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(1), 162–172.
- Kusuma, H. (2016). Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, 9(1), 1–11.
- Nasution, M., Maidalena, M., & Syahriza, R. (2015). *Bisnis & Investasi Dalam Islam*.
- Nurlaili, M. Y. S. E. (2022). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Jie*, 6(2), 178–187.
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217–240.
- Pratiwi, A., Yunitasari, D., & Wilantari, R. N. (2021). *Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur*.
- Prayoga, M. L., Muchtolifah, M., & Sishadiyati, S. (2021). Faktor Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo. *Jambura Economic Education Journal*, 3(2), 135–142.
- Rahayu, S., & Junaidi, J. (2022). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Dan Efisiensi Terhadap Pertumbuhanekonomi Dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2016-). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 7(2), 82–92.
- Rahma, T. I. F. (2018). Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Bagi Hasil Bank Syariah Di Indonesia. *J-Ebis (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 85–99.
- Rahman, R. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Kabupaten Jeneponto (Perspektif Ekonomi Islam)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media.
- Sri Adipura, I., Rahayu, S., & Junaidi, J. (2021). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal*,

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Vol 3 No 2 (2023) 586-608 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i2.3907

Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Dan Efisiensi Terhadap Pdrb Riil Per Kapita Dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening.

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.

Sri Yuniarti, V. (2016). *Ekonomi Makro Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.

Sugianto, S. (N.D.). *The Effect Of Profit Sharing Financing, Tpf And Capital On Net Profit Through Revenue Sharing On Buses*.

Syafina, L. (2018). *Panduan Penelitian Kuantitatif Akuntansi*. Medan: Febi Press.

Syafina, L. (2019). *Metode Penelitian Akuntansi*. Medan: Febi Press Uin Su.

Tambunan, K. (2016). *Analisis Pengaruh Investasi, Operasi Moneter Dan Zis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Tambunan, K., Harahap, I., & Marliyah, M. (2019). Analisis Kointegrasi Zakat Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018. *Aksar: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 249-264.

Yafiz, M., Arif, M., & Naser Daulay, A. (2016). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Medan: Febi Press Uinsu.

Zuhdiyaty, N., & Kaluge, D. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(2), 27-31.